**ISU DAN INFORMASI PEMBANGUNAN KELAUTAN**

*Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah*

*Pranata Sosial Perpustakaan dan Lembaga Informasi*

**Dosen Pengampu: Amir Fadhilah, M.Si.**



**Disusun oleh:**

Aspani Anggraeni 11220251000003

Rahmah Putri S. 11220251000005

Syalaisha Amani Fatiha 11220251000006

Hannia Syafinka Putri 11220251000049

Adam Arya Febriansyah 11220251000052

Aisyah Nadira Putri W. 11220251000099

**2A**

**PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**2023**

# KATA PENGATAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga kami sebagai penyusun dapat menyelesaikan penulisan makalah ini. Shalawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak mendapat tantangan dan hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Dengan dibuatnya makalah ini, semoga dapat mempermudah proses belajar dan memberikan wawasan bagi kami dan para pembaca. Serta kami menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar tercapainya kesempurnaan makalah ini.

Tangerang Selatan, Mei 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

[**KATA PENGATAR i**](#_Toc135678602)

[**DAFTAR ISI ii**](#_Toc135678603)

[**PENDAHULUAN 1**](#_Toc135678604)

[**1.1 Latar Belakang 1**](#_Toc135678605)

[**1.2 Rumusan Masalah 2**](#_Toc135678606)

[**1.3 Tujuan 2**](#_Toc135678607)

[**BAB II 3**](#_Toc135678608)

[**PEMBAHASAN 3**](#_Toc135678609)

[**2.1 DEFINISI PESISIR DAN MASYARAKAT PESISIR 3**](#_Toc135678610)

[**2.2 Orientasi Politik Pembangunan Kelautan 3**](#_Toc135678611)

[**2.3Ketidaksamaan Sosial Dalam Ikatan Patron Klien di Kalangan Nelayan Pantai 5**](#_Toc135678612)

[**2.5 Penetrasi Kapitalis Dalam Pembangunan Pesisir: Pola Ikatan Kerja Di Kalangan Nelayan 6**](#_Toc135678613)

[**2.6 Intervensi Program Pada Komunitas Nelayan Dalam Pembangunan Kelautan 10**](#_Toc135678614)

[**2.7 Isu Literasi Informasi Pembangunan di Sektor kelautan 11**](#_Toc135678615)

[**BAB III 12**](#_Toc135678616)

[**KESIMPULAN 12**](#_Toc135678617)

[**3.1 Kesimpulan 12**](#_Toc135678618)

[**3.2 Saran 12**](#_Toc135678619)

[**DAFTAR PUSTAKA 13**](#_Toc135678620)

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pembangunan kelautan (ocean policy) merupakan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendayagunakan dan memfungsikan laut secara bijaksana yang didukung oleh pemanfaatan daratan untuk kepentingan publik dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Kusumastanto, 2003).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 buah dan garis pantai sepanjang 81 ribu kilometer. Luas wilayah laut Indonesia termasuk di dalamnya Zona Ekonomi Eklusif sekitar 5,8 juta kilimeter persegi atau sekitar tiga per empat dari keleseluruhan wilayah negara Indonesia (Wahyono, 2001).

Pembangunan kelautan selama tiga dasawarsa terakhir selalu diposisikan sebagai sector pinggiran (peripheral sector) dalam pembangunan ekonomi. Dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sector perikanan, pariwisata bahari. pertambangan laut. industri maritime, perhubungan laut. Bangunan kelautan dan jasa kelautan, bukan menjadi arus utama (mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional (Kusumastanto, 2003). Kondisi ini menjadi ironis mengingat mengingat hampir 75 wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting, yakni antara Lautan pasifik dan Lautan Hindia yang merupakan jalur perdagangan internasional.

Untuk menjadikan sektor kelauatan sebagai leading sector dalam pembangunan,maka pendekatan kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antara sektor dalam bidang kelautan dan non kelautan. Dalam konteks ini perencanaan pembangunan melibatkan peran antar institusi pemerintah pusat dan daerah dan jaminan hukum yang pasti.

Masalah yang sampai saat ini menjadi pertanyaan besar adalah mampukah pemerintah mengelola potensi kelautan yang begitu besar untuk kepentingan nasional dengan hanya mengandalkan sebuah departemen kelautan dan perikanan tanpa keterkaitan dengan koordinasi dengan institusi negara yang lainnya ? Pertanyaan ini menjadi penting

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana Orientasi Politik Pembangunan Kelautan (Pesisir)?
2. Bagaimana Ketimpangan Sosial dalam Pembangunan Pesisir?
3. Bagaimana Penetrasi Kapitalis dalam Pembangunan Pesisir?
4. Bagaimana Intervensi Program pada Komunitas Nelayan dalam Pembangunan Kelautan?

## Tujuan

1. Memahami Orientasi Politik Pembangunan Kelautan (Pesisir)
2. Memahami Ketimpangan Sosial dalam Pembangunan Pesisir : Kasus Pola hubungan Patron Klien di kalang Nelayan
3. Memahami Penetrasi Kapitalis dalam Pembangunan Pesisir : Kasus Pola hubungan Patron Klien di kalang Nelayan
4. Memahami Intervensi Program pada Komunitas Nelayan dalam Pembangunan

# BAB II

# PEMBAHASAN

## 2.1 DEFINISI PESISIR DAN MASYARAKAT PESISIR

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku, namun, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan (interface area) antara ekosistem daratan dan laut. Definisi dan batas wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut. Batas ke arah darat meliputi (1) secara ekologis: kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang-surut, angin laut, dan intrusi air laut; (2) secara administrasi: batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter 2 km dari garis pantai.

Sedangkan batas ke arah laut meliputi (1) secara ekologis: kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi, dan mengalirnya air tawar kelaut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan; (2) secara administrasi: batas 4 mil dari garis pantai ke arah laut.

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat pesisir adalah berbagai pihak (baik perorangan, kelompok lembaga, maupun badan hukum) yang bermukim di wilayah pesisir dan memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir. Berdasarkan basis tempat tinggal dan mata pencaharian tersebut dapat dipetakan komponen masyarakat pesisir yakni nelayan, petani ikan, pemilik atau pekerja industri pariwisata, pemilik atau pekerja industri pariwisata, pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut, pemilik dan pekerja pertambangan dan energi, pemilik dan pekerja industri maritim galangan kapal.[[1]](#footnote-1)

## 2.2 Orientasi Politik Pembangunan Kelautan

Politik pembangunan nasional masih didominasi oleh orientasi politik pembangunan yang bervisi negara daratan, sementara Indonesia mempunyai luas lautan 5,8 juta km persegi. Namun, dalam prakteknya pembangunan lebih memfokuskan pada sektor daratan.[[2]](#footnote-2)

Menurut Karim (2004) urgensi dan latar belakang perlunya ada perubahan orientasi tersebut mengacu pada beberapa perspektif berikut ini:

1. Secara historis, kemajuan sektor kelautan pada abad 15-17 dikarenakan pendekatan politik saat itu dibangun atas kondisi empiris bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Saat itu kelautan khususnya transportasi laut berperan penting dalam perdagangan internasional dan interseluler yang ditandai oleh berkembangnya bandar- bandar besar seperti Sunda Kelapa, Banten, Gresik dan Makassar. Bandar-bandar tersebut menjadi pusat persinggahan para pedagang Arab, Cina, India dan Eropa. Puncak kejayaannya terjadi pada zaman keemasan kerajaan Islam pesisir (Demak, Samudera Pasai, Gowa,Banten) yang tangguh secara ekonomi, politik dan pertahanan keamanan di laut.
2. Kedua, Indonesia dikenal sebagai sebuah negara kepulauan serta bukan negara daratan. Perjuangan untuk menjadi negara kepulauan dimulai sejak Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 sampai akhirnya dikukuhkan oleh komunitas internasional pada tahun 1982 ketika PBB mengeluarkan United Nation Convention Law of Sea (UNCLOS) 1982. Pencitraan Indonesia sebagai negara agraris sebenarnya kurang tepat karena mengandung unsur politik kooptasi dan hegemoni penguasa yang bermaksud mengekang hak-hak politik dan ekonomi rakyat. Dengan demikian memudahkan penguasa mengendalikan dan mempertahankan kekuasaannya, karena manakala "urusan pemenuhan pangan pokok sudah beres, maka rakyat tidak mungkin berbuat macam-macam, karena itu komoditi beras kerap disebut sebagai komoditi politik.
3. Ketiga, kelautan secara definitif adalah sektor pembangunan yang mencakup sumber daya yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui termasuk sektor hulu dan hilirnya (jasa-jasa pendukungnya). Yang tak dapat diperbaharui antara lain pertambangan laut dan mineral. Sedangkan yang dapat diperbaharui perikanan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun juga dapat diperbaharui hulu dan hilirnya seperti kepelabuhanan, transpor laut, industri maritim, industri pertahanan, perdagangan antar pulau pariwisata bahari dan industri perikanan. Serta pendukungnya sepert pertahanan dan keamanan, dan kelembagaan (aspek hukum). Begitu kompleksnya sektor ini dalam implementasi kebijakannya, sehingga memerlukan keterkaitan dan sinergi antarinstitusi negara yang terlibat di dalamnya.
4. Keempat, secara sosio-antropologis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat heterogen yang memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat pedalaman. Masyarakat pesisir lebih dinamis terbuka, berjiwa enterpreneurship dan lebih demokratis dibandingkan masyarakat pedalaman yang tertutup, statis dan menerima apa adanya. Umpamanya, nelayan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan petani. Seseorang dikatakan "petani" apabila memiliki lahan (tanah) yang merupakan aset untuk melakukan proses produksi melalui bertani/budidaya. Sedangkan, seseorang dikatakan "nelayan " sukar untuk diidentifikasi karena tidak jelas apa aset yang dimilikinya dalam proses produksi? Apakah dia memiliki kapal motor, alat tangkap atau perahu? Hal lain adalah aktivitas nelayan ketika menangkap ikan bersifat berburu (hunter) bukan budidaya (cultivar) Aktivitas ini juga tergantung perubahan iklim, gelombang, arus dan angin. Mungkin dapat dibenarkan jika budidaya perikanan (tambak dan budidaya laut) dikelompokkan sebagai aktivitas Bertani. Karena di dalamnya ada kegiatan budidaya dan kepemilikan lahan (tambak udang). Inilah aspek sosio-antropologis yang harus dipahami secara jernih dan obyektif.
5. Kelima, secara geopolitik dan geostrategis letak Indonesia yang diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sangat mempengaruhi percaturan ekonomi dunia di kawasan Amerika maupun Eropa. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang ramai menghubungkan kawasan Pasifik dan Atlantik. Bukankah perekonomian di kedua kawasan itu akan lumpuh total jika Indonesia memblokade jalur pelayaran kapal- kapal yang berlayar menuju kedua kawasan itu, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Lombok dan Selat Makassar.
6. Keenam, bangsa Indonesia yang dibangun atas dasar perjuangan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke memberikan suatu warna sikap nasionalisme kebangsaan tersendiri ketimbang bangsa-bangsa lain di dunia. Sikap nasionalisme itu diterjemahkan sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan yang kerap disebut sebagai "Wawasan Nusantara”. Wawasan ini mencakup tiga matra yang menjamin keutuhan wilayah nasional yakni darat, udara dan laut.

## 2.3 Ketidaksamaan Sosial Dalam Ikatan Patron Klien di Kalangan Nelayan Pantai

Ketidaksamaan sosial dalam ikatan patron klien di kalangan nelayan salah satu ciri hubungan patronase (patron klien). Menurut JC Scoot adalah adanya ketimpangan (inequality) dalam pertukaran (dalam Heddy Shri Ahimsa, 1996 32). Ketimpangan tersebut terjadi karena patron (juragan) berada pada posisi yang lebih kuat dan lebih kaya daripada kliennya.

Distribusi pendapatan pada masyarakat nelayan dapat dipastikan terjadi penyebaran yang tidak merata. Kondisi ini tidak lepas dari sektor perikanan yang sifatnya padat modal, sehingga nelayan yang telah mengeluarkan biaya besar akan menuntut bagian yang besar pula, sedangkan pandega hanya menurut saja.

Ketidakseimbangan ini mengakibatkan pihak yang sering kali menerima bantuan pihak lain (pandega dari juragannya) akan berada pada posisi subordinasi. Hal tersebut sebagai akibat adanya perbedaan status dalam transaksi pertukaran dimana pihak yang statusnya lebih tinggi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Peningkatan produktifitas dan pendapatan nelayan terus dilakukan pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan baik berupa bantuan kredit, seperti diperkenalkannya program bantuan kredit dengan tingkat bunga yang rendah sejak tahun 1974, misalnya bantuan kredit untuk pemilik perahu dan anggota KUD Mina maupun kredit Bimas, dan pengenalan teknologi baru pada tahun 1975, yaitu paket mesin tempel serta kebijakan lainnya.

Seiring dengan bergulirnya proses modernisasi melalui pembangunan berbagai prasarana dan sarana kehidupan semakin membuka peluang masyarakat untuk melakukan mobilitas termasuk di dalamnya kaum nelayan. Dalam konteks ini kondisi nelayan buruh (pandega) yang sangat tergantung juragannya mendorong mereka untuk melakukan gerakan mobilitas sosial ke sektor lainnya di luar sektor perikanan. Akibat dari hal tersebut adalah baik secara langsung ataupun tidak langsung pola ikatan patron klien di kalangan nelayan kawasan Pantai Utara Jawa Tengah sedikit demi sedikit mengalami proses pemudaran (erosi) ikatan patron klien yang disebabkan oleh berbagai hal sebagaimana telah disebutkan di atas.[[3]](#footnote-3)

## 2.5 Penetrasi Kapitalis Dalam Pembangunan Pesisir: Pola Ikatan Kerja Di Kalangan Nelayan

Struktur nelayan seringkali dibedakan menjadi menjadi 2 kelompok, yaitu nelayan pemilik (juragan) dan nelayan buruh/anak buah kapal (pandega). Untuk kelompok juragan dibedakan lagi menjadi 2, yaitu juragan darat (mereka yang tidak ikut ke laut) dan juragan laut (nelayan pemilik kapal yang ikut ke laut). Sedangkan pandega dibedakan menjadi bangobal, jagan, juru mesin/ juru layar, juru masak dan penawu.

Jagan adalah pandega yang bertugas menebar jaring dan menariknya kembali). Bangobal adalah pandega yang bertugas memperbaiki jaring yang rusak. Juru mesin/juru layar adalah pandega yang bertugas dan bertanggung jawab atas berjalan tidaknya perahu di laut. Dan Penawu adalah pandega yang bertugas membuang air yang merembes dalam kapal.

Proses hubungan kerja pada awalnya ditandai dengan pemberian suatu bantuan dari seseorang juragan (patron) kepada pandega (klien). Bentuk pemberian tersebut biasa dikenal dengan dengan istilah 'bendoko pokok', yaitu suatu pemberian dari patron (juragan) kepada klien (pandega) sebagai tanda adanya ikatan (kontrak) kerja antar mereka. Adanya jaminan akan perolehan modal pada pandega dan di sisi lain berjalannya investasi modal yang dilakukan juragan, mengakibatkan semakin erat hubungan yang terjalin antara pandega sebagai klien dengan juragan sebagai patron dalam suatu hubungan yang saling membutuhkan.

Arus pola pertukaran dari patron (juragan) ke klien (pandega) mengacu pada pemikiran James C. Scott merupakan suatu penghidupan subsistensi dasar (1993: 9) yang lebih lanjut dapat dibedakan menjadi:

1. Jaminan krisis subsistensi Umumnya patron diharapkan memberikan pinjaman pada saat bencana ekonomi (musim paceklik ketika laut bergelombang besar) membantu keluarga pandega yang sakit ataupun mengalami musibah lainnya serta berbagai aktivitas sosial lainnya
2. Perlindungan. Dalam konteks ini perlindungan yang diberikan juragan (patron) kepada klien (pandega) merupakan bentuk bantuan bila klien (pandega) mengalami kesulitan yang tidak bisa ditangani sendiri, seperti berurusan dengan pihak berwajib baik masalah perizinan pelayaran maupun aktivitas lainnya
3. Makelar dan pengaruh. Jika patron melindungi kliennya dari pengrusakan pihak luar, ia juga menggunakan pengaruhnya untuk menarik hadiah dari luar bagi kepentingan kliennya.
4. Jasa patron kolektif. Dalam konteks ini patron (juragan) dapat mengelola dan mensubsidi sumbangan untuk kepentingan umum seperti membantu mengadakan memperbaiki sarana umum. ataupun aktivitas suatu perayaan selamatan sedekah laut.

Sedangkan arus pertukaran klien (pandega) ke patron (juragan) pada umumnya adalah menyediakan tenaga dan kemampuannya untuk kepentingan patronnya, seperti jasa pekerjaan dasar (hal-hal yang berkaitan dengan operasi penangkapan ikan). jasa tambahan seperti membantu berbagai aktivitas rumah tangga patronnya.

Bentuk balasan dalam pertukaran timbal balik antara patron (juragan) dengan kliennya (pandega) bukan hanya dalam kehidupan ekonomi semata, tetapi meluas ke aspek kehidupan sosial lainnya. Bentuk pertukaran yang meluas ini menimbulkan hubungan yang bersifat saling tergantung antara patron dengan klien. Dengan demikian secara ringkas pola ikatan patron klien dikalangan dapat digambar dalam skema berikut ini:

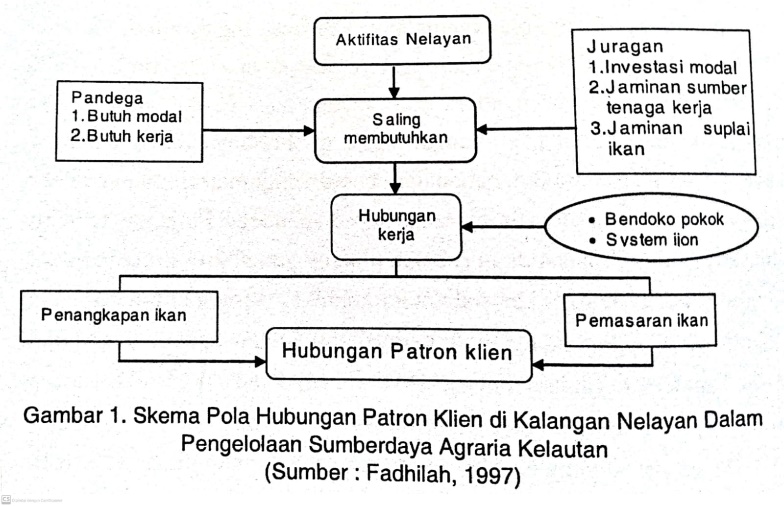
Komunitas nelayan sebagai bagian dari suatu komunitas makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu melibatkan orang lain. Sebab sesuatu yang dihasilkannya bukan semata-mata untuk keperluannya sendiri, dan sebaliknya tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri. Hal ini mendorong timbulnya interaksi timbal balik antara nelayan yang satu dengan nelayan lainnya.

Hubungan timbal balik yang terjalin tersebut terbentuk karena adanya rasa saling membutuhkan dan bergantung antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Pandega sebagai pihak yang tidak memiliki modal dan sarana penunjang untuk melakukan operasi penangkapan ikan, agar dapat bekerja mereka menjalin hubungan dengan juragan. Sebaliknya juragan sebagai pemilik modal agar usahanya dapat berkembang, menjalin hubungan dengan pandega sebagai sumber tenaga kerja yang dapat mengoperasikan modal yang dimiliki juragan, yaitu perahu beserta peralatannya untuk menangkap ikan. Dengan demikian juragan akan memperoleh kepastian akan jaminan suplai ikan secara terus menerus.

Kedudukan juragan (pemilik perahu) dalam sektor pengusahaan ikan sangat dominan, yaitu memiliki hampir semua modal yang ada. Sedangkan pandega (nelayan buruh) hanya sebagai sumber tenaga kerja bagi juragan. Namun demikian, kedudukan pandega dalam sektor penangkapan ikan memiliki nilai tersendiri. Keberadaan pandega tetap diperlukan oleh juragan, sebab tanpa pandega, seorang juragan akan mengalami kesulitan untuk menjalankan modal yang dimilikinya Kondisi demikian mendorong terciptanya interaksi timbal balik antara juragan dengan pandega yang mengarah pada ikatan hubungan kerja diantara mereka. Hubungan kerja ini biasanya diawali dengan adanya pemberian modal, baik dalam bentuk pinjaman ataupun bantuan uang dan sarana lainnya dari juragan kepada pandega Pinjaman tersebut biasanya tidak dimaksudkan sebagai piutang yang harus dikembalikan, tetapi sebagai ikatan kerja diantara mereka. Semua itu merupakan ikatan moral yang mengikat hubungan hubungan baik mereka, oleh Don Emmerson (dalam Faisal. 1990: 138) keadaan tersebut dinilai sebagai pola hubungan baik patron klien.

Ikatan moral yang terjalin antara pandega dengan juragan semakin menguatkan hubungan kerja mereka, sehingga tercipta hubungan timbal balik. Namun demikian hubungan timbal balik tersebut terjadi dalam kondisi yang diwarnai adanya ketidakseimbangan dari pihak yang satu (pandega) kepada pihak lain (juragan). Hal ini muncul karena pandega berada pada posisi subordinasi dari juragannya. Suatu posisi dimana seorang pandega harus mengakui bahwa dirinya berhutang dan tergantung pada juragannya.

Hubungan saling ketergantungan yang diwarnai ketidakseimbangan akibat adanya perbedaan status ekonomi antara juragan dengan pandega semakin kuat dan erat, dimana ikatan hubungan tersebut tidak hanya dalam sektor penangkapan ikan saja, tetapi meluas juga sampai pada pembagian hasil tangkapan ikan dan pemasarannya serta dalam aktivitas sosial lainnya. Dengan demikian secara ringkas skema pola hubungan patron klien di kalangan nelayan dapat digambarkan sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)



## 2.6 Intervensi Program Pada Komunitas Nelayan Dalam Pembangunan Kelautan

Program intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu intervensi langsung maupun tidak langsung (Wahyono. 2001). Intervensi tidak langsung adalah peraturan-peraturan pemerintah yang secara tidak langsung ikut membantu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan intervensi langsung adalah bantuan langsung yang diberikan komunitas nelayan. Walaupun telah banyak banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengembangan masyarakat nelayan, baik berupa pengadaan bangunan, peralatan, pelatihan maupun pemberian pinjaman uang, namun hasilnya ternyata belum seperti yang diharapkan. Hal ini tidak lepas dari kurang direncanakannya secara cermat terhadap program-program yang akan dikeluarkan dan lebih bersifat paket dari atas (top down).

Peluang pembangunan kelautan Indonesia yang mampu mengakses semua kepentingan masyarakat merupakan tantangan yang harus dipikirkan oleh semua pihak. Dalam konteks ini diperlukan adanya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, yaitu suatu proses yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan manajemen, kepentingan sektor publik, perlindungan dan pembangunan ekosistem serta sumberdaya pesisir (Budiharsono, 2001). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukannya paradigma pembangunan baru yang biasa disebut dengan paradigma inklusi sosial (social inclusion paradigma), yaitu paradigma yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dari mulai perencanaan sampai evaluasi dan pemantauan, masyarakat sebagai main stakeholder, yang memperhatikan hak-hak ulayat dan hak publik lainnya.

Paradigma inklusi sosial ini merupakan lawan dari paradigma eksklusi sosial yang selama ini diterapkan oleh negara-negara berkembang, yang menyebabkan timbulnya masyarakat marginal yang miskin dan mempunyai posisi tawar yang lemah. Selain perubahan paradigma tersebut juga harus ada perubahan fungsi pemerintah dari pola sentralistik menjadi desentralistik, dari top down menjadi bottom up.[[5]](#footnote-5)

## 2.7 Isu Literasi Informasi Pembangunan di Sektor kelautan

literasi informasi merupakan merupakan salah satu aktivitas penting dalam hidup. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi seseorang. Beberapa manfaat literasi informasi adalah untuk mendukung kesuksesan belajar sepanjang hayat, serta dapat memberi kontribusi dalam perkembangan pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena itu budaya literasi yang tertanam dalam diri individu berpengaruh pada tingkat keberhasilan baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya literasi pada individu dan masyarakat tentu tidak muncul begitu saja. Namun untuk mewujudkan budaya literasi informasi yang baik, diperlukan proses yang panjang dan sarana yang kondusif. Budaya literasi informasi bersifat akumulatif yang menghasilkan pembiasaan, dimulai sejak kecil dan didukung oleh lingkungan keluarga serta lingkungan, baik itu di lingkungan rumah maupun sekolah. Pembiasaan yang muncul pada kelompok-kelompok individu secara kolektif akan memunculkan budaya literasi yang menjadi identitas suatu kelompok masyarakat.

Secara umum, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir belum memiliki budaya literasi informasi. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan rendahnya budaya literasi, salah satu factor yang mendasar adalah tidak adanya pembiasaan aktivitas membaca. Beberapa data statistic menunjukkan hal tersebut. Kemampuan membaca (reading ability) anak-anak Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, bahkan dalam kawasan ASEAN sekalipun. Menurut International Association for Evaluation of Educational (IEA) pada tahun 1992, Indonesia berada di urutan ke-29 (dari 30 negara) dalam hal kemampuan membaca untuk kelompok umur siswa Sekolah Dasar Kelas IV.

Tingkat literasi informasi pada suatu masyarakat memiliki korelasi yang tinggi dengan program peningkatan pendidikan dan sumber daya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan dengan menggunakan beberapa parameter. Rachmawati (2019) melakukan pemetaan tingkat literasi dengan tiga parameter. Parameter pertama adalah yaitu ketersediaan dan keterserapan sumber informasi. Parameter kedua adalah akses terhadap sumber informasi. Parameter yang ketiga adalah dukungan regulasi pemerintah terhadap program literasi.

Tantangan literasi informasi masyarakat pesisir adalah serapan informasi yang rendah, kuantitas sumber informasi yang sedikit, dan kekurangan terkait sumber informasi. Selanjutnya, masyarakat di lokasi penelitian telah menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan literasi informasi.[[6]](#footnote-6)

# BAB III

# KESIMPULAN

## 3.1 Kesimpulan

pesisir adalah suatu wilayah peralihan (interface area) antara ekosistem daratan dan laut. Sedangkan masyarakat pesisir adalah berbagai pihak (baik perorangan, kelompok lembaga, maupun badan hukum) yang bermukim di wilayah pesisir dan memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir.

Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia.Di dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), masyarakat telahmengembangkan berbagai jenis teknologi penangkapan baik yang berskala tradisional maupun modern. Karena permintaan pasar akan komoditi perikanan dan kelautan yang bernilai ekonomis penting, perkembangan teknologi dan pola penangkapan masyarakat kadang kala kurang memperhatikan aspek keberlanjutan SDKP.Pengelolaan sumber daya laut perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pendayagunaan potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya, serta untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan khususnya sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

## 3.2 Saran

Pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan memerlukan komitmen bersama dari semua elemen serta dukungan SDM yang handal, mempunyai prinsip serta peka dan tanggap memberikan solusi. Komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder serta ketersediaan SDM yang memiliki integritas, profesionalisme dan memiliki kepedulian menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

# DAFTAR PUSTAKA

**Effendy, Mahfud. ‘PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU: SOLUSI PEMANFAATAN RUANG, PEMANFAATAN SUMBERDAYA DAN PEMANFAATAN KAPASITAS ASIMILASI WILAYAH PESISIR YANG OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN’ 2 (2009).**

**Irhandayaningsih, Ana. ‘Tantangan Literasi Informasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kota Semarang’. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 3, no. 1 (21 June 2019): 1–9. https://doi.org/10.14710/anuva.3.1.1-9.**

**Prof. Dr. H. Syamsir Salam, MS. and Amir Fadhillah, S.Sos., M.SI. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.**

1. Mahfud Effendy, ‘PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU: SOLUSI PEMANFAATAN RUANG, PEMANFAATAN SUMBERDAYA DAN PEMANFAATAN KAPASITAS ASIMILASI WILAYAH PESISIR YANG OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN’ 2 (2009). [↑](#footnote-ref-1)
2. Prof. Dr. H. Syamsir Salam, MS. and Amir Fadhillah, S.Sos., M.SI, *Sosiologi Pedesaan* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).205-207 [↑](#footnote-ref-2)
3. Prof. Dr. H. Syamsir Salam, MS. and Amir Fadhillah, S.Sos., M.SI, 212–213. [↑](#footnote-ref-3)
4. Prof. Dr. H. Syamsir Salam, MS. and Amir Fadhillah, S.Sos., M.SI, 208–213. [↑](#footnote-ref-4)
5. Prof. Dr. H. Syamsir Salam, MS. and Amir Fadhillah, S.Sos., M.SI, 204-205. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ana Irhandayaningsih, ‘Tantangan Literasi Informasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kota Semarang’, *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 3, no. 1 (21 June 2019): 1–9, https://doi.org/10.14710/anuva.3.1.1-9. [↑](#footnote-ref-6)